

PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Mukhyar

mukhyar1970mubu@gmail.com

Mahasiswa Doktoral Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta –
Indonesia

Maskur Rosyid

masykurxrejo@walisongo.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang - Indonesia

Abstract: This paper wants to see the other side of the role of various elements of society in contributing to nation-building. The acceleration of development is not solely the responsibility of the government as the holder of government administrative authority and state administration, but it is the joint responsibility of the whole community, including the Indonesian Ulama Council (MUI). In the context of education, MUI has contributed significantly in transforming the various developments of the times to contribute to improving the quality of Indonesian human resources. For example, MUI provides full support for equality of religious education and pesantren with public education institutions, provides full support for the existence of religious education institutions through the umbrella of the law, encouraging full strengthening and development of basic character education in educational institutions. From the various roles of the MUI in the development of education, it can be concluded that the greater the role of the MUI in the field of education, the more qualified Indonesian human resources are.

Keyword: *Indonesian Ulama Council; Education; Development; Transformation*

Abstrak: Tulisan ini ingin melihat sisi lain dari peran berbagai elemen masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Percepatan pembangunan bukanlah semata-mata mutlak tanggungjawab pemerintah sebagai pemegang otoritas administrasi pemerintah dan ketatanegaraan, tetapi menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam konteks pendidikan, MUI telah memberikan andil yang cukup besar dalam mentransformasi berbagai perkembangan zaman untuk dikontribusikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Misalnya MUI memberikan dukungan penuh untuk kesetaraan pendidikan keagamaan dan pesantren dengan lembaga pendidikan umum, memberikan dukungan penuh untuk eksistensi lembaga pendidikan keagamaan melalui payung undang-undang, mendorong sepenuhnya penguatan dan pengembangan pendidikan karakter dasar lembaga pendidikan. Dari berbagai peran MUI dalam pembangunan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar peran MUI dalam bidang pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kata Kunci: *Majelis Ulama Indonesia; Pendidikan; Pembangunan; Transformasi*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian terpenting sebagai penanda kemajuan suatu bangsa. Bila pendidikan disuatu Negara senantiasa bergerak maju dan diformat untuk mampu menjawab tantangan percepatan perubahan zaman, dan menjawab kebutuhan masyarakatnya. Maka Negara tersebut akan mengalami percepatan kemajuan menuju kehebatan peradaban. Itulah mengapa sejarah mencatat, ketika usai Perang Dunia ke II, Nagasaki dan Hiroshima luluh lantak dibantai bom atom Amerika dan tentara sekutu. Pertanyaan pertama yang diajukan Jepang, bukan berapa lagi harta Negara dapat diselamatkan, tetapi masih adakah guru yang tersisa.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Pendidikan merupakan bagian yang inhern dalam kehidupan manusia. Manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan. Jadi, menjadikan pendidikan sebagai faktor prioritas dalam seluruh kebijakan Negara, termasuk produk-produk kebijakan dari elemen-elemen pendukung pemerintah menjalankan fungsi pemerintahannya, adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Karena itu, dalam pendidikan, point pentingnya, bukanlah sebatas produk kebijakan yang dikeluarkan, tetapi bagaimana suatu kebijakan pendidikan yang telah dikeluarkan, dalam tataran implementasi menjadi tanggungjawab bersama yang terintegrasi.

Berangkat dari kenyataan itu, maka persoalan agama otomatis menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sebab agama adalah bagian vital yang sangat menentukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan pendidikan juga berada pada tempat yang setara. Maka pendidikan agama dalam ini pendidikan agama Islam, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, akan terpengaruh dan mempengaruhi gerak kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, organisasi yang mengayomi tata nilai kehidupan masyarakat menjadi penting untuk ikut serta dalam memajukan dan berkontribusi untuk perkembangan pendidikan. Sehingga pendidikan menjadi bagian yang berarti berada di segala lini kehidupan.

Pendidikan nilai adalah proses di mana orang memberi nilai moral kepada orang lain. Ini bisa menjadi kegiatan yang dapat terjadi di organisasi mana pun di mana orang dibantu oleh orang lain, yang mungkin lebih tua, dalam posisi otoritas atau lebih berpengalaman, untuk membuat eksplisit nilai-nilai yang mendasari perilaku mereka sendiri, untuk menilai efektivitas nilai-nilai ini dan perilaku yang terkait untuk kesejahteraan jangka panjang mereka dan orang lain dan untuk merenungkan dan memperoleh nilai-nilai dan perilaku lain yang mereka anggap lebih efektif untuk kesejahteraan diri dan orang lain dalam jangka panjang. Ada perbedaan antara keaksaraan dan pendidikan. Pendidikan nilai dapat dilakukan di rumah, serta di sekolah, akademi, universitas, penjara dan organisasi pemuda sukarela. Ada dua pendekatan utama untuk pendidikan nilai, beberapa melihatnya sebagai menanamkan atau mentransmisikan serangkaian nilai yang sering datang dari aturan sosial atau agama atau etika budaya sementara yang lain melihatnya sebagai jenis dialog Sokrates di mana orang secara bertahap dibawa ke realisasi mereka sendiri. tentang apa perilaku yang baik untuk diri mereka sendiri dan komunitas mereka.¹

Berbagai perubahan dan perkembangan dalam pendidikan Islam itu sepatutnya dapat lebih memacu untuk mengkaji dan meningkatkan lagi kualitas diri, demi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan Islam di Indonesia. Telah lazim diketahui, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia banyak diwarnai perubahan, sejalan dengan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Sejak dari awal pendidikan Islam, yang masih berupa pesantren tradisional hingga modern, sejak madrasah hingga sekolah Islam *bonafide*, mulai Sekolah Tinggi Islam sampai Universitas Islam, semua tak luput dari dinamika dan perubahan demi mencapai perkembangan dan kemajuan yang maksimal. Pertanyaannya kemudian apakah sudah dicermati dan dipahami bagaimana kemunculan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, untuk kemudian dapat bersama-sama meningkatkan kualitasnya, demi tercipta pendidikan Islam

¹<https://www.jstor.org/topic/values-education/>, diakses pada tanggal 30 September 2018.

yang humanis, dinamis, berkarakter sekaligus juga tetap dalam koridor *Alqur'an* dan *Assunah*.

Salah satu pintu masuk menjaga pendidikan adalah melalui organisasi yang benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, dan menjadi panutan masyarakat. Dalam konteks ini dalam sebuah jurnal ilmiah menjelaskan bahwa sekolah adalah tempat yang paling penting untuk menumbuhkan nilai-nilai pendidikan, dan sekolah yang baik itu apabila mau terbuka sekaligus berafiliasi dengan organisasi keagamaan. Karena muatan-muatan pembelajaran serta penambahan nilai-nilai keagamaan, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan akan semakin diperkaya dengan adanya kontribusi aktif dari organisasi keagamaan, baik dalam penyajian materi, pengembangan, maupun pembinaan.²

Senada dengan hal ini, dalam organisasi keagamaan warna penanaman nilai pemaafan, serta keberanian untuk meminta maaf lebih dapat dikembangkan. Sebagaimana yang dipraktikkan Lebron James pada tahun 2010, meminta maaf secara terbuka atas berita bohong yang pernah publikasikannya. Karena organisasi keagamaan lebih luas menjangkau ke berbagai lapisan masyarakat, strata sosial, ekonomi, bahkan antar umat beragama. Sehingga dialog-dialog akan lebih dan terbuka. Kondisi seperti ini yang memungkinkan terjadinya pentransferan yang luas di lembaga pendidikan, tidak hanya sebagai *transformation of knowledge*, tetapi mengikutkan *transoformation culture, value, religion, information, dan social*.³

Dalam kaitannya dengan organisasi keagamaan, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka sebagai organisasi keagamaan yang didirikan agar agar hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan fungsi utamanya dalam

² <https://www.jstor.org/topic/parochial-schools/>, diakses pada tanggal 30 September 2018.

³Denise M. Bostdorff and Daniel J. O'Rourke, "Religion, Sport, and The Return of the Prodigal Son: The Postsecular Rhetoric of Lebron James's 2014 "I'm Coming Home" Open Letter," Rhetoric and Public Affairs, Vol. 21, No. 1, Spring, (2018), https://www.jstor.org/stable/10.14321/rhetpublaffa.21.issue-?refreqid=excelsior_%3A75881a5_cdbce54774f93ef4ee063d48a, diakses pada tanggal 30 September 2018.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah memberi nasihat, fatwa, dan saran kepada pemerintah; mempererat hubungan sesama, dan menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat dengan tidak masuk ke dalam hal-hal praktis baik dalam dunia politik maupun sosial.

Pada masa-masa awal berdirinya MUI, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditujukan agar bisa diterima dalam masyarakat dan memelihara hubungan baik dengan pemerintah, juga organisasi Islam lainnya. Kunjungan ke beberapa kantor-kantor pusat organisasi Islam dilakukan, terkadang juga beberapa pimpinan pusat organisasi tertentu diundang ke kantor MUI. Berbagai pertemuan diadakan, seminar tentang berbagai hal yang dihadiri oleh para ulama, dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak ulama dalam tingkat nasional. Hal ini dilakukan demi terjalinnya silaturahmi dan hubungan baik antara pusat dan daerah.

Kadang-kadang, MUI juga bertindak sebagai wakil organisasi-organisasi Islam. Dalam hal terakhir ini, hubungan MUI dengan organisasi Islam yang lain sangat pelik. Sebab, organisasi Islam sering kali mempunyai sikap tidak menentu, terutama bila keberadaan MUI mengancam eksistensi mereka dalam masyarakat. Maka begitu unik dan luasnya peran MUI, menjadi sangat urgen dalam memperkokoh sekaligus mengembagkan pendidikan, tidak hanya pendidikan agama Islam, tetapi pendidikan secara luas, terutama dalam menghindari dikotomi ilmu yang dapat membuat umat Islam terpinggirkan dalam pengetahuan. Karena itu, ada dua aspek penting yang ingin didiskusikan dalam makalah ini, yaitu: (1) Kebijakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang pendidikan, (2) Peran strategis MUI di bidang pendidikan (sebuah sumbangan pemikiran).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Mui Dalam Bidang Pendidikan

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan

setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, di Satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan maupun masyarakat.

Pendidikan dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari tujuan pendidikan. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Pendidikan diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Pendidikan dalam pandangan agama Islam juga diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut Islam dalam membentuk seorang muslim yang mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang artinya, “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat: 56). Maksud dari kata menyembah di ayat ini adalah mentauhidkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah sebagaimana telah

dijelaskan oleh Ibnu Abbasrodhiyallohu ‘anhu, seorang sahabat dan ahli tafsir. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Tidaklah mereka diciptakan untuk menghabiskan waktu kalian untuk bermain-main dan bersenang-senang belaka. Sebagaimana firman Allah, “Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan, tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian.”⁴ “Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”⁵

Sehingga jelas bahwa tujuan pendidikan dalam Islam harus terkait dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri di dunia ini, yakni menyembah Allah dengan segala aspeknya ibadahnya, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Ibadah yang juga berhubungan dengan masalah ukhrowi (akherat) maupun masalah dunia (ilmu dunia).

Ulama adalah pewaris para nabi. Hadis ini disebutkan oleh al-Suyūi sebagai hadis da’if, namun banyak dipegangi oleh masyarakat di Indonesia. Buktinya, di Indonesia, ulama memiliki posisi yang demikian dihormati dan disegani. Bukan hanya itu, ulama juga memiliki peran yang signifikan di bidang sosial, bahkan politik. Dalam Pedoman Pokok Majelis Ulama Indonesia ditegaskan bahwa fungsi Majelis Ulama adalah sebagai berikut:

- a. Memberi fatwa dan Nasihat mengenai masalah sosial keagamaan kepada Pemerintah dan Umat Islam sebagai amar ma’ruf nahi munkar;
- b. Memperkuat ukhuwwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama;
- c. Mewakili umat Islam dalam dialog antarumat beragama;
- d. Penghubung antara ulama dan pemerintah serta penterjemah antara pemerintah dan umat;

⁴Lihat QS, Al Anbiya, 16-17.

⁵Lihat QS, Al-Mu’minun, 115.

- e. Tidak berpolitik dan tidak bersifat operasional.

Dalam upaya mencapai tujuannya, MUI melaksanakan beberapa usaha sebagaimana disebutkan dalam pedoman Dasar MUI hasil Munas V Juli 1995 di Jakarta Bab II pasal 4,⁶ antara lain:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
- b. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat.
- c. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.
- e. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim.
- f. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama.
- g. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Ketika memasuki era reformasi, perubahanpun terjadi di sana sini. Hal ini sangat tampak dari hasil MUNAS VI Juli 2000.⁷ Di dalam Wawasannya yang dirumuskan dalam MUNAS tersebut, MUI mengutip beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan pentingnya peran ulama dalam masyarakat. Selain itu, beberapa hal yang berkaitan dengan peranan ulama sebagai pewaris nabi, bekerja sama dengan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat saling bahu membahu dalam membangun masyarakat yang maju dan memiliki akhlaq mulia, sekaligus mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi, baik dalam negeri maupun dalam tingkat internasional, sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang baru, yakni masyarakat madani (khair al-ummah) yang menekankan nilai-nilai persamaan (al-musāwāh), keadilan (al-‘adālah), dan demokrasi (syūrā).

⁶Lihat pedoman Dasar MUI hasil Munas V Juli 1995 di Jakarta.

⁷Lihat hasil Munas MUI VI Juli 2000.

Untuk mewujudkan itu semua, MUI kemudian mencanangkan lima perannya dalam masyarakat, yaitu :

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi;
- b. Sebagai pemberi fatwa;
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat;
- d. Sebagai gerakan *islāh wa al-tajdīd*; dan
- e. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahyi munkar.

Hal lain yang sangat mendasar yang mengalami perubahan setelah memasuki era reformasi terlihat jelas pada Bab II pasal 2 yang berkaitan dengan asas. Dalam pasal ini, MUI secara tegas menyatakan bahwa organisasi ini berasaskan Islam, berubah dari pedoman sebelumnya yang mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. Hal lain yang mengalami perkembangan adalah pola hubungan antara pusat dan daerah yang pada mulanya hanya bersifat membina, membimbing, dan koordinasi (pasal 5 Pedoman Dasar hasil Munas V Tahun 1995) berubah menjadi hubungan organisasi yang bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Di samping itu, dicantumkan pula pola hubungan dengan organisasi Islam lainnya yang bersifat konsultatif dan kemitraan (pasal 8 Pedoman Dasar hasil Munas VI tahun 2000).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya semata-mata fokus pada bidang halal haram, terutama dalam hal pemberian label halal pada makanan. Tetapi hampir di seluruh tatanan kehidupan masyarakat MUI selalu hadir untuk dapat memberikan pedoman bagi umat dalam bersikap agar tidak melenceng dari syariat. Maka berkaitan dengan pendidikan, MUI juga memberikan perhatian. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018.⁸ Dalam Ijtima' ini ada empat poin penting yang menjadi pembahasa utama, yaitu: (1) Masail Asasiyah Wathaniyah, (2) Masail Fiqhiyah Mu'ashirah, (3) Masail Fiqhiyah Mu'ashirah, (4) Masail Qanuniah. Khusus berkenaan dengan pendidikan terdapat dalam pembahasan keempat "Masail Qanuniah huruf (g) "Pandangan MUI tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP).

⁸ Lihat Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018.

Memperhatikan perhatian MUI melalui Ijtima' VI tersebut, pada dasarnya memberikan dukungan terhadap inisiatif DPRRI, namun memberikan perhatian penting pada aspek:

- a. MUI memberikan dukungan agar lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren memperoleh pengakuan dan perlakuan yang sama dan setara dengan lembaga pendidikan umum yang sudah ada dan diakui negara.
- b. MUI memberikan dukungan agar RUU ini menjadi payung hukum bagi penguatan eksistensi dan peran lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.
- c. MUI mengingatkan, bahwa harus ada batasan agar pengaturan dalam RUU ini tidak mengubah apalagi menghilangkan karakter dasar lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang mandiri, memiliki nilai-nilai dan kultur keilmuan yang khas, mengakar di masyarakat, melayani semua orang tanpa diskriminasi, berorientasi pengabdian dan pemberdayaan, serta jauh dari orientasi bisnis pendidikan. Pengaturan yang ada harus memperkuat karakter dasar yang khas ini, karena karakter itulah yang membuat lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mampu bertahan dan terus berkembang dalam segala situasi dan terus berkontribusi untuk umat, masyarakat dan bangsa, ada atau tidak ada dukungan dari negara. Dengan kata lain, kemandirian pendidikan pesantren perlu diatur dengan karakteristiknya yang khas.
- d. MUI pada prinsipnya tidak bermasalah jika Negara masuk mengatur lembaga pendidikan agama Islam melalui Undang-Undang, tetapi tidak mengatur hal-hal yang terlalu teknis seperti rincian kurikulum dan mata pelajaran pertingkat, persyaratan teknis, rincian sarana dan prasarana yang harus dimiliki dan lain-lain yang biasanya diatur dalam peraturan di bawah UU atau bahkan juklak dan juknis

Selanjutnya dalam hal mengawal kepentingan umat dan bangsa Indonesia MUI banyak hal yang telah dilakukan oleh MUI,⁹ diantaranya adalah:

- a. MUI perlu meneguhkan jati dirinya sebagai "organisasi ulama waratsatul anbiya" yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal perjalanan umat Islam dan bangsa Indonesia ke depan menuju baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amanah ulama ini sangat berat sehingga perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
- b. Ulama dan khususnya pengurus MUI harus memiliki ilmu pengetahuan keagamaan yang mendalam yang membedakannya dengan masyarakat biasa. Dengan ilmu pengetahuannya yang mendalam disertai dengan ketakwaannya yang tinggi, ulama akan menjadi tempat bertanya masyarakat dalam berbagai macam bidang kehidupan. Perhatikan QS Asy- Syu'ara [26] ayat 197 dan QS Fathir [35] ayat 28. Para ulama harus memberi contoh untuk terus-menerus belajar sebagai - mana para ulama salafus shalih terdahulu. Diskusi dan dialog secara lisan maupun tulisan yang terjadi pada masa lalu tersebut telah membangun khazanah keilmuan yang sangat berharga dan sangat tinggi nilainya.
- c. MUI perlu memberikan perhatian khusus pada program kaderisasi ulama, dengan melakukan penjangkaran kader-kader muda yang potensial di berbagai lembaga pendidikan. Pendidikan ulama yang terbaik adalah melalui pembelajaran langsung secara individual kepada ulama-ulama terkemuka di dunia (mulazamah) sehingga ke depan kualitas ulama Indonesia semakin meningkat dan disegani dalam tataran internasional.
- d. MUI perlu meningkatkan peranannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dunia internasional, khususnya yang menimpa umat Islam di berbagai belahan dunia. Setidaknya, MUI bersama ulama-ulama lain di Indonesia memberikan masukan kepada Pemerintah RI agar meningkatkan keaktifannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam di dunia

⁹<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/09/06/nu96cb313-tujuh-tugas-mui-untuk-mengawal-umat-dan-bangsa>. KHAZANAH Friday, 11 Muharram 1440 / 21 September 2018, diakses pada tanggal 30 September 2018.

inter nasional, seperti masalah Palestina, Rohingya, Kashmir, Pattani, Moro, dan sebagainya.

- e. MUI perlu merumuskan konsep pendidikan Islam yang ideal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi untuk menentukan konsep pembentukan insan-insan Muslim yang ideal ke masa depan. Konsep Ma'had Aly yang sudah diakui sebagai salah satu bentuk Pendidikan Tinggi dalam UU No 12/2012 perlu dijabarkan bersama Kementerian Agama agar pendidikan tinggi tidak semata-mata diarahkan untuk membentuk pekerja industri, tetapi untuk membentuk manusia-manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan profesional. Dalam bidang pendidikan ini pula, MUI perlu mengontrol dan memberi masukan kepada pemerintah agar buku-buku ajar di sekolah-sekolah benar-benar tidak bertentangan dengan ajaran dan konsep keilmuan dalam Islam.
- f. Patut disyukuri bahwa selama ini peran MUI dalam mengawal isi media massa, khususnya televisi sudah dirasakan umat Islam. Untuk meningkatkan peran MUI dalam hal "mengawal media massa", perlu juga dilakukan monitor dan bimbingan terhadap media online Islam sehingga media-media itu semakin berkualitas isinya. Sebab, mereka saat ini memainkan peranan yang penting dalam mengarahkan pola pikir umat Islam. Media-media yang memuat isi-isi yang ekstrem, baik ekstrem fundamentalis maupun ekstrem liberal, perlu diingatkan oleh MUI.
- g. Guna meningkatkan kemandirian MUI maka perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk melakukan penggalangan dana umat bagi kepentingan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan.

Senada dengan tujuh pernyataan di atas, dalam penjelasan lain disebutkan juga bahwa Pendidikan Islam sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Peran pendidikan Islam setidaknya ada tiga hal yakni menjaga

bangsa tetap religius, misi mencetak kader ulama yang mujaddid, dan kekuatan harokah diniyah bangsa Indonesia di mata dunia.¹⁰

Lebih lanjut Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Dr. H. Affandi Mochtar, MA, menjelaskan bahwa “Pendidikan Islam hadir sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan wujud perjuangan pendidikan Islam yang sangat panjang sejak dahulu kala. Pendidikan Islam dari sisi ideologis dan politis juga diciptakan, dijaga dan dipertahankan oleh para pendiri bangsa guna membentuk karakter bangsa Indonesia,” Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia tentunya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi dan modernisasi atau hal-hal yang bersifat material positivistik semata, melainkan Indonesia ikut dalam percaturan global dunia. Namun di sela-sela itu, Indonesia tidak bisa juga menjadi bangsa yang hedon dan tanpa nilai, bangsa Indonesia ikut modernisasi tanpa meninggalkan ajaran agama, dan nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui jalur pendidikan. Ditjen Pendidikan Islam dalam tugas fungsinya dalam bidang pendidikan agama melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar yang mengharuskan pendidikan agama sebagai bagian integral sistem pendidikan nasional. Dan pendidikan agama yang dikelola pemerintah tercantum dalam muatan wajib semua jenjang dan jenis pendidikan sehingga nilai-nilai agama tetap terpatri dalam sanubari anak-anak didik di negara kita.

Menurut Affandi juga, pendidikan Islam punya visi untuk senantiasa memastikan adanya komunitas ahli agama dalam sebuah bangsa. Hal tersebut merupakan keharusan dalam ihwal negara yang beragama, “kita tidak ingin ada tindakan yang salah atas nama agama. Peran ulama atau ahli agama adalah menuntun agama sebuah bangsa sehingga sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan pendidikan sebagai sarana menyampaikan paham yang benar sangat diwajibkan.” Dalam setiap zaman memang terus-menerus dilahirkan pembaharu atau mujaddid agama yakni tokoh ulama yang berhasil menerjemahkan atau mentransformasikan ajaran agama ke dalam ideologi sebuah negara. Islam bisa terus eksis dalam era

¹⁰https://gemaislam.com/2924-mui-penguatan-pendidikan-karakter-sebaiknya_-melalui-peraturan-presiden.html, Friday, 11 Muharram 1440 / 21 September 2018, 25 Juli 2012, diakses pada tanggal 29 September 2018.

globalisasi karena peran ulama. Untuk itulah, menjadi kewajiban adanya lembaga pendidikan Islam guna menelurkan ulama-ulama yang hebat di zamannya. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena menjadi bangsa yang berhasil merekonsiliasi ajaran agama dengan ideologi negara.

Dengan pendidikan Islam, karakteristik Indonesia sebagai sebuah bangsa diwarnai juga dengan harokah diniyah (pergerakan keagamaan) semacam Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dsb. Tanpa mereka mustahil bangsa ini bisa berdiri dan bertahan melalui berbagai rintangan peradaban. Jalan yang ditempuh mereka pun sebagian besar adalah melalui pendidikan, maka tumbuh dan berkembangnya perjuangan yang kuat sebagai bangsa yang berkarakter religius memberi visi kemana bangsa Indonesia harus melangkah.

Begitu juga dalam merespon sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), maka Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

MUI mengharapkan agar pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tidak terburu-buru memberlakukan Permendikbud No, 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Sebab, peraturan tersebut hingga kini masih menjadi polemik dan mendapat penolakan di masyarakat dalam skala luas dan semakin massif, sehingga jika dipaksakan untuk diberlakukan justru akan menjadi kontraproduktif terhadap program kerja Presiden Joko Widodo tentang Nawa Cita yang bertujuan untuk membangun karakter bangsa dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045.

Mengingat Penguatan Pendidikan Karakter menuju generasi emas 2045 merupakan program nasional, maka MUI mengharapkan agar kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) agar skala cakupannya lebih luas dan dalam implementasinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

MUI mengharapkan agar dalam pembahasan Perpres dimaksud, pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan, seperti kementerian terkait serta MUI,

PBNU dan PP Muhammadiyah. Hal ini sejalan dengan penegasan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Ketua Umum MUI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 9 Juni 2017. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter, sebagai kebijakan nasional.

Pelibatan MUI dan ormas-ormas Islam, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pembahasan materi Peraturan Presiden dipandang sangat penting agar Perpres yang merupakan kebijakan nasional, dapat diterima dan didukung dengan baik oleh seluruh golongan masyarakat sehingga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, MUI memohon agar Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah ditunda pemberlakuannya dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan kegiatan sosialisasi maupun langkah-langkah lain yang dapat menimbulkan pro dan kontra, sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI tentang Program Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa.

Dengan demikian, memperhatikan peran aktif MUI dalam berbagai bidang kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan, sampai pada pengaturan berbangsa dan bernegara MUI telah menunjukkan peran strategisnya dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Tetapi jika dicermati lebih dalam khusus bidang pendidikan kontribusi yang diberikan oleh MUI Indonesia masih terlihat pada tataran konseptual. Masih perlu dilakukan berbagai upaya dan terobosan, agar MUI tidak hanya bergerak pada tataran konsep, tetapi memiliki deregulasi untuk masuk pada ranah aplikatif.

2. Peran Strategis MUI dalam Bidang Pendidikan; Sebuah Sumbangan Pemikiran

Tujuan pendidikan dalam Islam yang paling hakiki adalah mengenalkan peserta didik kepada Allah SWT. Mengenalkan dalam arti memberikan pembelajaran tentang keesaan Allah, kewajiban manusia terhadap Allah dan aspek-aspek aqidah lainnya. Dalam hal ini dapat dikaji dari nasehat Luqman kepada

anaknyanya yang digambarkan Allah dalam firmanNya: “Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknyanya diwaktu ia memberikan pelajaran kepadanya: ”hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang nyata.”¹¹

Melalui kegiatan praktek pendidikan Islam ini ajaran Islam tersebar luas ke tengah-tengah masyarakat dan mempengaruhi hati, pikiran dan perbuatan manusia dan tumbuh berkembang menjadi sebuah tradisi keagamaan yang kuat. Bersamaan dengan itu berbagai pranata sosial, seni, budaya, dan lainnya juga tumbuh berkembang. Mesjid, majelis ta’lim, perkumpulan zikir, upacara-upacara dan peringatan keagamaan, kesenian Islami, musabaqah tilawatil Qur’an, manuskrip, buku, jurnal, dan surat kabar Islam, siaran keagamaan, dan lain sebagainya. Di samping itu, lahir pula para ulama dengan berbagai tingkatan serta karya-karyanya dalam ilmu agama Islam, sebagaimana dijumpai dalam berbagai kitab yang ditulisnya. Tidak hanya itu, pendidikan Islam, baik yang formal, maupun non-formal, juga telah menghasilkan para cendekiawan dan ilmuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan umum: kimia, fisika, biologi, matematika, astronomi, kedokteran, farmakologi, dan lain sebagainya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah institusi yang strategis, sesungguhnya dapat lebih memainkan perannya tidak hanya menonjol dalam hal pemberian fatwa sebagai mana yang dipahami masyarakat secara umum, tetapi dapat masuk ke wilayah yang paling praktis dan implementatif, tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam, tetapi dapat berkontribusi untuk kepentingan dan pembangunan bangsa. Karena itu, untuk menuju institusi MUI yang professional mampu menjawab berbagai tantangan dan tuntutan masyarakat kekinian dan akan datang, ada beberapa aspek yang harus segera dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu:

- a. Entrepreneurship dan usaha ekonomi kreatif

¹¹ Lihat Q.S 31:13

Richard Cantillon¹² adalah orang pertama di dunia yang memperkenalkan istilah *entrepreneur*. Secara ringkas disebutnya sebagai “*agent who buys means of production at certain prices in order to combine them*”. Dalam ekonomi Cantillon menawarkan penyeimbangan antara penawaran dan permintaan dengan menanggung risiko atau ketidakpastian. Bukunya “*Essai sur la nature du commerce en général*,”¹³ memberikan pemahaman, bahwa *entrepreneur* merupakan gambaran seseorang yang memiliki kemampuan serta motivasi dalam diri untuk berkeinginan melakukan berbagai usaha yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan orang banyak, sekaligus berusaha mencari keuntungan melalui sistem kerja.

Memperhatikan makna dari *entrepreneurship* dalam konteks kewirausahaan, sesungguhnya telah lama dipraktikkan dalam kegiatan berusaha hampir di seluruh dunia, baik dalam perusahaan-perusahaan berskala kecil, menengah, bahkan sampai kelas internasional. Jika dikaitkan dengan pendidikan, banyak ahli yang sepakat, bahwa *entrepreneur* adalah penerapan konsep dan praktik kewirausahaan kepada peserta didik, sehingga peserta didik memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai wirausahawan. Kepemilikan sifat usahawan atau pengusaha, sering disebut sebagai seorang “*Durchsetzer neue combination*.”¹⁴

¹²Hannah Orwa Bula (ABD), “*Evolution and Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the Kenyan Perspective*,” International Journal of Business and Commerce, Vol. 1, No.11, Juli 2012, ISSN: 2225-2436, www.ijbcnet.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

¹³Richard Cantillon, adalah orang pertama di dunia yang memperkenalkan istilah *Entrepreneur*. Pada tahun 1755 menulis buku yang berjudul “*Essai sur la Nature du Commerce en General*.” Dalam buku tersebut dijelaskan, bahwa wirausahawan merupakan pihak yang bertanggungjawab atas semua pertukaran dan sirkulasi dalam ekonomi. Berbeda dengan pekerja upahan dan pemilik lahan yang menerima pendapatan tetap/tertentu. Sedangkan Pengusaha pendapatan atau keuntungannya, selalu dalam ketidakpastian. Karena itu, Cantillon memandang perlunya penyeimbangan antara penawaran dan permintaan dalam ekonomi, agar dapat mengontrol risiko dan ketidakpastian tersebut. Lihat buku Richard Cantillon, *Essai sur la nature du commerce en general*, (Paris: Institut Coppet, 2011), www.institutcoppet.org

¹⁴*Durchsetzer neue combination combination*, adalah Istilah dari Joseph Schumpeter. Maksudnya, usaha gigih seseorang agar dapat mengkombinasikan berbagai sumber daya ekonomi, sehingga mampu melahirkan sikap inovator dan inspirator, antara lain: (a) berani mengambil resiko, (b) termotivasi untuk mandiri, (c) senantiasa terbuka terhadap gagasan-gagasan baru, (d) memiliki gagasan dan kemauan untuk membangun kemandirian ekonomi, (e) mampu menciptakan kreatifitas ekonomi, (f) terus-menerus berupaya memperbaiki posisi keunggulan komparatifnya, (g) apabila mengalami kegagalan tetap berupaya untuk bangkit kembali. Lihat, J. Winardi,

Memperhatikan pentingnya pendidikan *entrepreneurship* di pondok pesantren jauh sebelum diterbitkan petunjuk resmi, kementerian agama telah merespon dengan melaksanakan pelatihan bidang wirausaha, agrobisnis, koperasi, serta teknologi komunikasi dan informasi kepada guru dan pimpinan pondok pesantren, diikuti oleh 120 utusan pesantren mewakili 34 provinsi seluruh Indonesia. Diklat yang dilaksanakan dengan dua pola kegiatan, *on campus* dan *off campus*, dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kompetensi guru pondok pesantren baik dalam pengetahuan maupun keterampilan, mengelola dan mengembangkan sumber daya pondok pesantren, agar mampu menjadi lembaga yang terdepan melahirkan *entrepreneur-entrepreneur* muda.¹⁵

Merujuk pada data di Kementerian Agama, jumlah Pondok Pesantren saat ini mencapai 27.290 unit dengan tenaga pendidik 160.793 orang dan santri 3,87 juta orang. Untuk merespon sumber daya yang begitu besar, menurut Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati, pesantren dapat dikembangkan dengan memiliki 3 (tiga) peran strategis, yaitu: *Pertama*, sebagai lembaga bisnis pesantren, melaksanakan usaha di sektor produksi, konsumsi, pemasaran, jasa atau simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan dan kemandirian pesantren, serta pengembangan bisnis dalam skala nasional maupun internasional; *Kedua*, melalui inkubasi bisnis santri, dengan menjadikan pondok pesantren menjadi laboratorium bisnis santri, guna melahirkan wirausaha muslim yang tangguh dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia; *Ketiga*, sebagai sentra

Entrepreneur & Entrepreneurship, (Jakarta: Prenada Media, 2003). Karena itu, dalam lembaga pendidikan perlu diterapkan kewirausahaan sebagai suatu materi pelajaran dalam sekolah-sekolah formal, dengan tujuan untuk memberikan nilai-nilai pengetahuan/teori dan keterampilan, agar peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan, untuk mulai membangun suatu usaha. Pendidikan juga dimaksudkan untuk melatih dan menumbuhkan minat kepada masyarakat untuk berwirausaha, sehingga tujuan pendidikan bukan menambah angka pencari kerja, tetapi mendidik dan melatih agar memiliki kemampuan membuka lapangan pekerjaan atau berwirausaha. Lihat Mustaqim Syaib, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Trussmedia Grafika, 2017), 5.

¹⁵<https://kemenag.go.id/berita/read/501609/kemenag-latih-guru-pesantren-tentang-wirausaha-dan-teknologi-informasi>.

bisnis lokal dengan melibatkan masyarakat mengembangkan sumberdaya dan kearifan lokal untuk membuat produk unggulan daerah.¹⁶

Lebih lanjut disebutkan, untuk terwujudnya tiga aspek strategis tersebut, dapat dilakukan melalui program-program strategis Kemkop dan UKM yang disinergikan dengan Pesantren. Antara lain, penguatan melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), peningkatan kualitas SDM KUMKM melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan (*entrepreneurship*), promosi dan pemasaran produk pesantren melalui Lembaga Layanan Pemasaran KUMKM (Smesco UKM). Selain itu, sinergi peningkatan akses pembiayaan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pembiayaan Kredit Ultra Mikro (Umi), bantuan Wirausaha Pemula, serta bantuan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM. Singkatnya, potensi pondok pesantren sangat memiliki peran strategi untuk meningkatkan perekonomian umat dan bangsa secara keseluruhan.¹⁷

b. Entrepreneurship MUI dan Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah

Pelaksanaan pendidikan di sekolah, dipastikan tidak terlepas dari kurikulum. Untuk melakukan perubahan terhadap kurikulum diperlukan kajian dan biaya yang banyak. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia dapat berperan dengan merancang suatu model entrepreneurship untuk dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Model ini dapat masuk ke dalam kegiatan yang sudah ada seperti Pramuka, ataupun dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Hal ini diperuntukkan agar sejak dini generasi muda memahami bahwa permasalahan mendasar yang dialami oleh bangsa sesungguhnya bukan soal ideologi, kerukunan, NKRI, ataupun kebhinekaan. Tetapi persoalan utama pada suatu bangsa itu adalah ekonomi.

¹⁶<http://keuangan.kontan.co.id/news/kemkop-nilai-pondok-pesantren-cukup-strategis-jadi-pusat-pemberdayaan-ekonomi>, Senin, 22 Januari 2018. diakses pada tanggal 19 Mei 2018.

¹⁷<http://keuangan.kontan.co.id/news/kemkop-nilai-pondok-pesantren-cukup-strategis-jadi-pusat-pemberdayaan-ekonomi>, Senin, 22 Januari 2018. diakses pada tanggal 19 Mei 2018.

Lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan agama Islam, keliru dalam memandang persoalan ini. Muatan mata pelajaran tidak menyeimbangkan antara penyiapan diri santri atau siswa untuk meneruskan kehidupannya. Tetapi hari-hari siswa dipaksa untuk melahap sejumlah materi ajar, yang belum tentu materi-materi tersebut dapat berkontribusi langsung untuk membantuk kelangsungan hidupnya. Data menunjukkan bahwa Potensi pesantren yang begitu besar untuk dikembangkan sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Ternyata, di lapangan belum berbanding lurus dengan peningkatan kader-kader atau pelaku *entrepreneurship* dari alumni pondok pesantren. Data di PD Pontren Kementerian Agama menunjukkan, dari jumlah 4 juta lebih santri, hanya 10 persen yang menjadi kader ulama dan guru agama. Artinya 90 persen dari jumlah tersebut, mestinya diberikan pilihan-pilihan *life skill*, dipersiapkan menjadi pengusaha dan pelaku industri. Sehingga potensi menjadi potensi besar untuk dibentuk menjadi pelaku *entrepreneurship*.¹⁸

Jika membahas pendidikan *enterpreneur* di lembaga pendidikan, pertanyaan pokok yang mesti diajukan, adalah apakah lembaga pendidikan mampu berperan sebagai lembaga yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi melalui praktik *enterpreneur*? Inilah pertanyaan kritis yang dikemukakan oleh Jean-Pierre dan Denis Greogoire.¹⁹ Dalam sebuah risetnya menjelaskan, bahwa mempersiapkan sarjana yang mampu menangkap peluang dan kemandirian, harus diterapkan formulasi yang dapat mencegah sarjana manajemen tidak hanya sebatas memiliki kemampuan teoritis. Tetapi mereka harus dipersiapkan untuk memiliki kemampuan mengatasi berbagai keterbatasan, melalui pengembangan keahlian ganda dengan mengoptimalkan seluruh infrastruktur kewirausahaan. Lebih lanjut

¹⁸<http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/22/p2ya32396-kemenag-potensi-santri-sangat-besar-untuk-jadi-entrepreneur>, Senin, 22 Januari 2018. diakses pada tanggal 20 April 2018.

¹⁹Jean Pierre, Bechard and Denis Gregoire, “*Entrepreneurship Education Research Revisite: The Case of Higher Education*,” *Academy of Management Learning&Education*, Vol. 4, No. 1, (2005), <http://www.jstor.org/stable/40214261>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

dijelaskan, kemampuan tersebut dapat ditempuh melalui prisma teori kontemporer yang memberikan penekanan lebih pada berlatih dalam pendidikan, diartikulasikan dalam empat aspek penting, disebutnya dengan empat jenis keasyikan utama dalam pendidikan, yaitu: (1) keasyikan dengan sosial dan ekonomi peran pendidikan kewirausahaan untuk individu dan masyarakat, serta dengan lembaga pendidikan tinggi sendiri; (2) keasyikan dengan sistematisasi pendidikan kewirausahaan (yaitu, desain instruksional, penggunaan multimedia lingkungan, dan pengembangan kurikulum); (3) keasyikan dengan masalah konten untuk diajarkan dan bagaimana konten ini harus disampaikan; dan (4) keasyikan dengan kami memfokuskan secara pendidikan kewirausahaan dalam konteks formal pendidikan tinggi. Empat aspek ini berdasarkan penelitian tersebut, mampu mengatasi persoalan menjawab keraguan bahwa kewirausahaan dalam pendidikan tidak berdampak luas.

Menurut Wolfgang Bielefeld,²⁰ jika diperhatikan sekolah-sekolah bisnis di seluruh dunia, memberikan perhatian yang serius untuk memenuhi kebutuhan keberhasilan individu melalui dengan memasukkan *entrepreneurship* ke dalam strategi pendidikan. Aspek identitas sosial dan pendekatan *self-efficacy* untuk pendidikan kewirausahaan sosial, berfokus untuk membantu siswa mengembangkan identitas sebagai wirausahawan sosial dan memperoleh keyakinan pada kemampuan mereka untuk melakukan perubahan sosial yang positif. Dalam penelitiannya, ditemukan, bahwa tantangan untuk menanamkan keterampilan kewirausahaan dapat diatasi melalui pengajaran kewirausahaan sosial dan inovasi *pedagogi*. Karena sangat diyakini, kewirausahaan sosial mampu memberikan dampak yang signifikan menanamkan keyakinan individu siswa untuk menjadi pribadi *entrepreneur*, pada gilirannya memiliki kemampuan untuk mengembangkan *enterperneur* secara luas dalam kehidupan masyarakat.

²⁰Wolfgang Bielefeld. "Issues in social enterprise and social entrepreneurship," Journal of Public Affairs Education, <http://www.naspaa.org/JPAEmessenger/Article/JPAE-Vol.15-No1-Winter2009-Bielefeld.pdf>, 69. diakses pada tanggal 20 April 2018.

Greg Dees Seromg disebut sebagai “Bapak Pendidikan Kewirausahaan Sosial”, lebih 20 tahun terakhir mengajar kursus kewirausahaan sosial” diberbagai sekolah bisnis terkemuka di Amerika, termasuk Harvard, Stanford dan di Duke. Apa yang menjadi temuan utamanya adalah, di beberapa sekolah bisnis terkemuka, dalam pembelajaran bisnis masih kurang dalam pedagogi pengajaran. Akibatnya, pelaku bisnis dikemudian hari mengabaikan kepentingan sosial, sehingga tidak memiliki kemampuan mengatasi permasalahan ekonomi sosial secara global. Karena itu, pada sekolah-sekolah bisnis harus dikembangkan semangat dan komitmen untuk mendidik dengan muatan *social entrepreneurship education*.²¹

Untuk menumbuhkan *entrepreneur* dalam kehidupan masyarakat, maka *entrepreneurship* sebagai sebuah konsep sekaligus praktik, harus masuk ke dalam sistem pendidikan dan menjadi pembelajaran sosial dan gerakan *entrepreneur* sosial. Dengan demikian pengetahuan dan pembelajaran *enterpereneur* menjadi gerakan yang masif dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Carole Howorth Susan M. Smith dan Caroline Parkinson²² melalui penelitiannya “*Social Learning and Sosial Enterpreneurship Education*”. Menjelaskan, bahwa untuk percepatan *entrepreneurship* dapat dikembangkan melalui pendidikan kewirausahaan sosial melalui tujuh prinsip utama pendidikan wirausaha sosial, yaitu: (1) desain pembelajaran *entrepreneurship*, (2) terbukanya dialog antar perspektif, (3) mengundang partisipasi aktif masyarakat, (4) mengembangkan ruang publik dan komunitas pribadi, (5) Fokus pada nilai, (6) Menggabungkan keakraban dan kegembiraan, (7) membentuk komunitas yang dinamis. Selanjutnya ketujuh

²¹E. L. Worsham, “*Reflections and Insights on Teaching Social Entrepreneurship: An Interview With Greg Dees*,” *Academy of Management Learning & Education* 11, No. 3 (1 September 2012): 442, <https://doi.org/10.5465/amle.2011.0024>. diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

²²C. Howorth, S.M. Smith, dan C. Parkinson, “*Social Learning and Social Entrepreneurship Education*,” *Academy of Managment Leraning & Education* 11, No. 3 (1 September 2012): 371, <https://doi.org/10.5465/amle.2011.0022>. diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

prinsip utama ini ditumbuhkembangkan di lembaga pendidikan melalui pendidik dan peserta didiknya.

Lebih lanjut Jean-Pierre dan Denis Greogoire²³ menambahkan, bahwa masyarakat fungsional lebih menekankan peran pendidikan dalam transmisi pengetahuan, nilai, dan praktik yang merupakan dasar dari budaya masyarakat, yang secara nyata direalisasikan dalam bentuk pelatihan untuk memberikan kebebasan kepada individu memilih berbagai ragam pekerjaan. Model seperti ini mempertimbangkan teori yang disebut dengan ekonomi pendidikan. Karena diyakini mampu menjadikan kewirausahaan sebagai embrio perkembangan pendidikan *entrepreneur*.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Tattwamasi Paltasingh,²⁴ memberikan pendapat yang senada dengan fokus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam lembaga pendidikan. Lebih lengkap dijelaskannya, bahwa pendidikan *entrepreneur* sangat penting untuk meningkatkan kemampuan siswa, agar mampu hidup secara mandiri, berkarya, serta mampu memberdayakan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, *entrepreneur* harus masuk dalam skenario lembaga pendidikan. Lebih jauh dicontohkan, skenario yang diberlakukan di negara India, tergambar dalam lima persiapan, yaitu: (1) mempersiapkan generasi muda untuk mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, (2) kreatifitas dan interest dari pikiran muda diasah dan diasah melalui sistem pendidikan, (3) kewirausahaan harus menjadi kurikulum yang bisa diperkenalkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan, (4) kewirausahaan harus mampu diidentifikasi sebagai salah satu komponen penting untuk perkembangan pendidikan, (5) pelaksanaan Pendidikan kewirausahaan harus bisa difasilitasi masuk ke lembaga pendidikan.

c. MUI semacam “LIPI” Pendidikan Islam

²³Jean Pierre, Bechard and Denis Greogire, *Entrepreneurship Education*, ... 23 – 26.

²⁴Tattwamsi Paltasingh, “*Entrepreneurship Education & Culture of Enterprise: Relevance & Policy Issues*,” *Indiana Journal of Industrial Relations*, Vol. 48, No. 2 (2012), 233-246, <http://www.jstor.org/stable/23509835>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

Berkaca pada misi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),²⁵ yaitu: (1) Mendorong peningkatan pemanfaatan pengetahuan dalam proses penciptaan good governance dalam rangka memantapkan NKRI, (2) Turut serta dalam proses pencerahan kehidupan masyarakat dan kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kaidah etika keilmuan, (3) Memperkuat peran Indonesia (yang didukung ilmu pengetahuan) dalam pergaulan internasional, (4) Memperkuat infrastruktur kelembagaan (penguatan manajemen dan sistem). Kemudian tertuang pula dalam dalam tujuh fungsi: (1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan, (2) Penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat mendasar, (3) Penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus, (4) Pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi, (5) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI, (6) Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang ilmu pengetahuan, (7) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Berkaitan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk dapat berperan dalam riset-riset kelas dunia, harus mampu melakukan berbagai terobosan-terobosan berani, antara lain:

- 1) Merubah design gedung dari berwajah tempat berkumpulnya ulama memiliki gedung yang representatif sekelas gedung riset bertaraf dunia. Dilengkapi dengan berbagai laboratorium pendukung. Sehingga kesan MUI hanya sebatas pemberi fatwa dan label halal dapat dihilangkan.
- 2) Merubah struktur organisasi dengan mengakomodir perpaduan ulama dan ilmuwan sains, sehingga dalam manajemennya akan ditemukan deputi-deputi yang menangani berbagai riset. Misalnya ketika riset filologi – manuskrip dapat dilakukan di laboratorium milik MUI.

²⁵ <http://www.lipi.go.id/>

- 3) Perpustakaan dengan teknologi canggih dapat menjadi rujukan dunia, sehingga nama besar Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia berbanding lurus dengan jumlah riset-riset keislaman yang dikeluarkan.
- 4) Menjadikan MUI sebuah lembaga yang kedudukannya sama seperti POLRI langsung dibawah Presiden, sehingga rentang kendali organisasi dapat berjalan cepat.
- 5) Memiliki hak untuk merekrut tenaga ahli sendiri, karena itu MUI memiliki anggaran yang langsung di bawah APBN

C. KESIMPULAN

Dalam konteks pendidikan, MUI telah memberikan andil yang cukup besar dalam mentransformasi berbagai perkembangan zaman untuk dikontribusikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Misalnya MUI memberikan dukungan penuh untuk kesetaraan pendidikan keagamaan dan pesantren dengan lembaga pendidikan umum, memberikan dukungan penuh untuk eksistensi lembaga pendidikan keagamaan melalui payung undang-undang, mendorong sepenuhnya penguatan dan pengembangan pendidikan karakter dasar lembaga pendidikan. Dari berbagai peran MUI dalam pembangunan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar peran MUI dalam bidang pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia Indonesia.

REFERENSI

- Cantillon, Richard, *Essai sur la Nature du Commerce en General*. Paris: Institut Coppel, 2011, www.institutcoppel.org
- C. Howorth, S.M. Smith, dan C. Parkinson, “*Social Learning and Social Entrepreneurship Education*,” *Academy of Management Learning & Education* 11, No. 3 (1 September 2012): 371, <https://doi.org/10.5465/amle.2011.0022>. diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

Denise M. Bostdorff and Daniel J. O'Rourke, "*Religion, Sport, and The Return of the Prodigal Son: The Postsecular Rhetoric of Lebron James's 2014 "I'm Coming Home" Open Letter,*" *Rhetoric and Public Affairs*, Vol. 21, No. 1, Spring,

(2018), <https://www.jstor.org/stable/10.14321/rhetpublaffa.21.issue-?refreqid=excelsior%3A75881a5cdbc54774f93ef4ee063d48a>, diakses pada tanggal 30 September 2018.

E. L. Worsham, "*Reflections and Insights on Teaching Social Entrepreneurship: An Interview With Greg Dees,*" *Academy of Management Learning & Education* 11, No. 3 (1 September 2012): 442, <https://doi.org/10.5465/amle.2011.0024>. diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

Hannah Orwa Bula (ABD), "*Evolution and Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the Kenyan Perspective,*" *International Journal of Business and Commerce*, Vol. 1, No.11, Juli 2012, ISSN: 2225-2436, www.ijbcnet.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

Jean Pierre, Bechard and Denis Gregoire, "*Entrepreneurship Education Research Revisited: The Case of Higher Education,*" *Academy of Management Learning & Education*, Vol. 4, No. 1, (2005), <http://www.jstor.org/stable/40214261>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

Syaib, Mustaqim Kewirausahaan, Jakarta: Trussmedia Grafika, 2017.

Tattwamsi Paltasingh, "*Entrepreneurship Education & Culture of Enterprise: Relevance & Policy Issues,*" *Indiana Journal of Industrial Relations*, Vol. 48, No. 2 (2012), 233-246,

Wolfgang Bielefeld. "*Issues in social enterprise and social entrepreneurship,*" *Journal of Public Affairs Education*, <http://www.naspaa.org/JPAEmessenger/Article/JPAE-Vol.15-No1-Winter2009-Bielefeld.pdf>, 69. diakses pada tanggal 20 April 2018.

<http://www.jstor.org/stable/23509835>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

<https://www.jstor.org/topic/values-education/>, diakses pada tanggal 30 September 2018.

<https://www.jstor.org/topic/parochial-schools/>, diakses pada tanggal 30 September 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/09/06/nu96cb313-tujuh-tugas-mui-untuk-mengawal-umat-dan-bangsa>. KHAZANAH Friday, 11 Muharram 1440 / 21 September 2018, diakses pada tanggal 30 September 2018.

<https://gemaislam.com/2924-mui-penguatan-pendidikan-karakter-sebaiknya-melalui-peraturan-presiden.html>, Friday, 11 Muharram 1440 / 21 September 2018, 25 Juli 2012, diakses pada tanggal 29 September 2018.

<https://kemenag.go.id/berita/read/501609/kemenag-latih-guru-pesantren-tentang-wirusaha-dan-teknologi-informasi>.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/kemkop-nilai-pondok-pesantren-cukup-strategis-jadi-pusat-pemberdayaan-ekonomi>, Senin, 22 Januari 2018. diakses pada tanggal 19 Mei 2018.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/kemkop-nilai-pondok-pesantren-cukup-strategis-jadi-pusat-pemberdayaan-eknomi>, Senin, 22 Januari 2018. diakses pada tanggal 19 Mei 2018.

<http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/22/p2ya32396-kemenag-potensi-santri-sangat-besar-untuk-jadi-entrepreneur>, Senin, 22 Januari 2018. diakses pada tanggal 20 April 2018.

<http://www.lipi.go.id/>

Pedoman Dasar MUI hasil Munas V Juli 1995 di Jakarta.

Hasil Munas MUI VI Juli 2000.

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018.